

GTI Desak Kejati Telusuri Dana Pungli

DENPASAR- Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar oleh satuan Ditreskrimsus Polda Bali terus menuai sorotan. Ini karena dugaan keterlibatan sejumlah pejabat. Kasus yang menyeret Kabid Perizinan Dinas Perizinan Pena-

naman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPPMPSP) Gianyar, I Nyoman Sukarja, 50, dan Kepala Dinas (Kadis) DPPMPSP Gianyar, I Ketut Mudana, 48, ini disambut respons lanjutan. Sejumlah perwakilan elemen masyarakat yang tergabung dalam perwakilan Garda Tipikor

Indonesia (GTI) Gianyar, Senin kemarin (21/8) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kedatangan tiga perwakilan GTI ini selain meminta penyidik Kejati Bali mengembangkan aliran dana dalam OTT yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali terhadap dua pejabat teras

Pemkab Gianyar. Mereka juga diminta melakukan penyelidikan. Yakni terkait aliran dana ke sejumlah pejabat.

Ini seperti ditegaskan Pande Nyoman Rata dan Ida Bagus Gaga Ardana, selaku perwakilan dan juga koordinator GTI Gianyar ■

► Baca GTI... Hal 35

Humas Enggan Berkomentar

■ GTI...

Sambungan dari hal 25

Di kesempatan ini dijelaskan bahwa dalam kasus yang saat ini tinggal menunggu pelimpahan ke Kejati Bali itu, sebenarnya sudah dilakukan keduanya sejak Mudana menjabat sebagai Kadis DPPMPSP Gianyar sekitar satu tahun lalu. "Soal besaran pungli beragam," tandasnya.

Dicontohkan Pande, seperti pada pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal dikenakan pungli berkisar Rp 15 juta hingga Rp 25 juta. Untuk izin pondok wisata dikenakan pungli mulai Rp 50 juta hingga Rp 75 juta.

Untuk izin vila dikenakan pungli mulai Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan pungli untuk

izin hotel kelas melati mulai Rp 200 juta sampai Rp 250 juta. "Sedangkan untuk pungli ijin hotel bintang bisa mencapai kisaran Rp 2 miliar sampai Rp 4 miliar," ungkapnya.

Uang hasil pungli tersebut, lanjut Pande diduga mengalir ke beberapa pejabat di Gianyar. Pande Nyoman Rata meminta penyidik Kejati Bali mengungkap aliran dana pungli ini dalam persidangan. Selain itu, penyidik juga diminta menelusuri dugaan *money laundry* atau "cuci uang" dalam pungli ini yang diduga digunakan untuk membeli beberapa aset. Seperti tanah dan rumah. "Laporan ini juga ditembuskan sampai Presiden RI, KPK, Kejaksaan, Mabes Polri dan instansi terkait lainnya," bebernya.

Sementara itu, Kasi Penkum

dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar didampingi Kasi Penuntutan, Wayan Suardi membenarkan telah menerima laporan dari GTI Gianyar. Namun dia terkesan enggan menanggapi. "Kasusnya sekarang sudah P-21 (berkas sudah lengkap). Tinggal menunggu pelimpahan dan sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar," ujarnya.

OTT yang dilakukan Satgas Counter Transnational and Organized Crime (CTOC), Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali ini sendiri, kata Edwin berdasarkan laporan dugaan pungli terkait pengurusan Tanda Daftar Usaha Panwisata (TDUP) Nomor 503/065/DPMPSTSP/PW/2017, milik I Putu Suasta yang diajukan oleh Dewa Nyoman Oka Trisandi, ke Kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, Senin lalu (12/6).

Setelah mendapat laporan tersebut, Tim Satgas CTOC dibawah komando Wadir Reskrimsus, AKBP Ruddi Setiawan langsung melakukan penyelidikan. Saat dilakukan serah terima pungli, petugas langsung melakukan OTT di ruang Kabid Perizinan B itu, I Nyoman Sukarja, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemkab Gianyar. Tim menemukan beberapa barang bukti di antaranya uang tunai Rp 14.450.000. Hasil pengembangan, penyidik menetapkan Kadis DPPMPSP Gianyar, Mudana sebagai orang di balik pungli tersebut. (pra/pit)

Edisi : Selasa, 22 Agustus 2017

Hal : 25 dan 35

Rumjab Bupati dan Wakil Terus Dikebut

MANGUPURA, NusaBali

Proyek pembangunan rumah jabatan bupati dan wakil bupati Badung, yang dikejakan PT Bianglala Bali dengan pengawas PT Kencana Adhi Karma, progresnya sudah mencapai 25,531 persen. Ditarget proyek ini rampung akhir 2017.

"Perkembangan proyek sudah mencapai 25,531 persen, semoga berjalan lancar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba didampingi Kabid Cipta Karya I Gusti Arinda, Senin (21/8).

Berdasarkan pantauan sudah tampak dua bangunan berdiri di lokasi yang tak jauh dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung di areal Puspem Mangupura Mandala di Sempidi, Kecamatan Mengwi.

Menurut Surya Suamba, proyek bakal dikerjakan selama 210 hari dari tanggal kontrak yang dikerjakan. Menurutnya, pembangunan rumjab bupati dan wakil bupati menggunakan konsep Tri Mandala. Pada utamaning mandala adalah tempat persembahyangan berupa padma dan piyasan. Kemudian madyaning mandala adalah pusat rumah dinas, terdapat ruang pendopo, ruang pertemuan, dan kamar tidur utama. Untuk ruang perte-

muan ada yang besar dengan kapasitas 100 orang, ada yang menengah, dan private. Sedangkan rumjab wakil bupati hanya satu ruang pertemuan. Sementara pada nistaning mandala, ada garasi dan ruang tidur atau ruang istirahat untuk ajudan, sopir, dan pembantu.

"Jadi konsepnya dirancang secara tradisional Bali. Untuk luas bangunan rumah jabatan bupati seluas 1.339 meter persegi dan rumah jabatan wakil bupati, 1.303 meter persegi," tutur Surya Suamba.

Terkait anggaran, sesuai dengan nomor kontrak 105/KNT.DPUPR.TB/2017 tertanggal kontrak 29 Mei 2017 dan tanggal SPMK 30 Mei 2017, senilai Rp 23 miliar lebih. "Anggaran Rp 23 miliar ini khusus untuk bangunan rumah jabatan, nanti untuk gedung pertemuan anggarannya beda lagi," tandasnya.

Untuk diketahui, saat ini bupati dan wakil bupati masih menempati rumjab lama yang terletak di Jalan Praja, Dalung, Kuta Utara. Rumjab ini sebelumnya juga ditempati oleh Bupati Badung AA Gde Agung. Secara fisik rumjab lama masih layak, tetapi lokasinya kurang strategis untuk kediaman kepala daerah, karena cukup jauh dari Puspem Badung. **asa**



PEMBANGUNAN rumah jabatan bupati dan wakil bupati di areal Puspem Badung, di Sempidi, Kecamatan Mengwi, terus dikebut. Foto diambil, Senin (21/8).
● NUSABALI/ARI SISWANTO

Edisi : Selasa, 22 Agustus 2017

Hal : 2

Diloloskan, Dana Pengawasan

Pilgub Senilai Rp 62 Miliar

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sar Rp 62 miliar yang diajukan Bawaslu Bali, sudah selesai. "Dana pengawasan Pilgub Bali 2018 seluruhnya mencapai Rp 62 miliar," tegas Putu Astawa.

Menurut Astawa, skema penganggaran dana pengawasan Pilgub Bali 2018 dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dianggarkan di APBD Induk 2017 sebesar Rp 10 miliar. Kedua, dianggarkan di APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 17 miliar. Ketiga, dianggarkan di APBD Induk 2018 sebesar Rp 35 miliar.

"Jadi, anggaran Rp 17 miliar yang sebelumnya sempat tidak terpasang di APBD Perubahan 2017, sudah kita pasang, setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Bali," beber birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Astawa menyebutkan, verifikasi RAPBD Perubahan 2017 oleh Kemendagri saat ini sedang berjalan. Setidaknya, perlu waktu dua pekan bagi Kemendagri untuk verifikasi. Setelah verifikasi, selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan 2017.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah

Pemayun juga mengatakan dana pengawasan Pilgub Bali 2018 sudah tidak ada masalah lagi. Kalau pun sebelumnya sempat ada pembahasan alot, menurut Tjok Pemayun, itu adalah proses.

"Setelah dilakukan penyisiran dan pembahasan, ya skema awal yang diajukan Bawaslu Bali terpenuhi. Sekarang proses verifikasi di Kemendagri," ujar Tjok Pemayun yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

Tjok Pemayun mengatakan, begitu nanti selesai verifikasi, Raperda APBD Perubahan 2017 akan ditetapkan dalam lembaran daerah dengan terlebih dulu ditandatangani Sekda Provinsi Bali. "Nanti ditandatangani Sekda Provinsi Bali untuk ditetapkan dalam lembaran daerah, maka APBD Perubahan 2017 sudah sah berlaku," tandas birokrat asal Puri Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar yang juga mantan Karo Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali dan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.

Bawaslu Bali sendiri sebelumnya menyodorkan skema anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018 dengan 3 kali pencairan, masing-masing di APBD Induk 2017 senilai Rp 10 miliar,

APBD Perubahan 2017 senilai Rp 17,31 miliar, dan APBD Induk 2018 senilai Rp 35,57 miliar. Total anggaran yang diajukan Bawaslu saat dipanggil Sekda Tjok Pemayun yang didampingi Kepala Badan Kesbanglimaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama, 20 Juni 2016 lalu, adalah Rp 62, 89 miliar. "Saat itu sudah final dan disepakati dan kami diminta membuat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," beber Rudia.

Namun, dalam surat Nomor 910/4084/EKS/Bappeda-Litbang, Sekda Provinsi Bali setuju anggaran pengawasan Pilgub 2018 senilai Rp 62 miliar dengan skema dua tahap pencairan, yakni di APBD Induk 2017 senilai Rp 10 miliar dan APBD Induk 2018 senilai Rp 52 miliar. Hal ini membuat kelabakan Bawaslu Bali.

Karena persoalan dana pengawasan Pilgub 2018 untuk Bawaslu Bali yang tidak selesai ini, sampai-sampai DPRD Bali dan Tim Anggaran Daerah Provinsi Bali beberapa kali melakukan rapat koordinasi lagi. Sampai akhirnya dicapai kesepakatan dana pengawasan Pilgub Bali 2018 kembali ke awal, yakni melalui tiga tahap pencairan.

Sementara itu, Ketua Pansus

APBD Perubahan 2017 DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, berharap beresnya masalah dana ini harus dibarengi dengan pelaksanaan pengawasan pesta gong demokrasi Pilgub Bali 2018 yang maksimal oleh Bawaslu Bali. Kariyasa Adnyana menyatakan verifikasi di Kemendagri untuk APBD Perubahan 2017, tidak akan ada masalah.

"Kita pastikan akan berjalan lancar. Termasuk dana pengawasan dan dana Pilgub 2018 untuk KPU Bali. Ini harus dibarengi dengan kinerja yang maksimal oleh Bawaslu dan KPU Bali," ujar Kariyasa Adnyana secara terpisah di Denpasar, Senin kemarin.

Politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini mengatakan dengan dana ratusan miliar untuk pesta gong demokrasi Pilgub Bali 2018, diharapkan melahirkan pemimpin yang punya kualitas bagus. "Sehingga uang rakyat yang digunakan menjangir dan melahirkan pemimpin dalam Pilgub Bali, tidak sia-sia. Kita harapkan proses penyelenggaraan yang jujur dan demokrasi yang berkualitas. Di sini peran KPU Bali dan Bawaslu Bali," tegas Kariyasa yang sudah tiga kali periode duduk di Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng. **nat**

Diloloskan, Dana Pengawasan Pilgub Senilai Rp 62 Miliar

DENPASAR, NusaBali

Sempat terjadi pembahasan alot gara-gara eksekutif tidak bisa menganggarkannya di APBD Perubahan 2017, dana pengawasan Pilgub Bali 2018 akhirnya beres. Dana pengawasan bagi Bawaslu Bali tetap digolkan sebesar Rp 62 miliar, setelah masuk dalam Rancangan APBD Perubahan 2017 yang dikirimkan ke Mendagri untuk proses verifikasi.

Hal ini diakui langsung Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa, di Denpasar, Senin (21/8). Putu Astawa mengatakan, dana pengawasan Pilgub Bali 2018 sebe-



Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Siang 22 Agustus 2017

Hal : 1